



JPALG Vol 3 (2) (2019): hlm 94-104

JPALG**Journal of Public Administration and Local Governance**<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>

Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara

Ibnu Kanaha**Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Halmahera**

Received: 28 Maret 2019. ; Accepted: 17 April 2019.; Published: 28 Oktober 2019

Abstrak

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh organisasi pemerintah Desa berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur Desa di Desa Tolonuo Selatan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa yang terdapat dalam APBDES tahun 2017 terdapat dua program infrastruktur yang di realisasikan pada tahun 2017, hal ini dapat di lihat kondisi yang terjadi di lapangan dimana peneliti melihat bahwa, kurangnya informasi yang di dapat masyarakat dalam proses implementasi program yang ada di Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Desa Tolonuo Selatan pembangunan infrastruktur di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, serta faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa Tolonuo Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan desa. Hasil dari penelitian menunjukan pelaksanaan program belum ada sosialisasi dari pemerintah desa dan juga mengenai anggaran pun masyarakat tidak mengetahui sehingga mekanisme kerjanya tidak baik dan proses pelaksanaannya tidak baik karena anggarannya sudah habis, sehingga pelaksanaan untuk program yang ada tidak terlaksana sesuai dengan target kerja yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Desa.

Kata Kunci : Implementasi Program; Pembangunan Desa; Kearifan Lokal.

© 2019 Public Administration Programme, Universitas Tidar. All rights reserved

* Corresponding author :
Address: Jl. Raya Wari, Wari Ino, Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, Maluku Utara
E-mail: ibnukanaha@yahoo.co.id

P-ISSN: 2614-4433
E-ISSN: 2614-4441

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pemerintah tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan tersebut diraih dengan mengimplemetasikan pembangunan terhadap masyarakat yang ada, diantaranya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka dari itu untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa, Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa, Pelaksanaan program sektoral yang

masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Maka untuk mengimplementasi berbagai program pembangunan yang ada penting bagi pemerintah, namun satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan dalam mengimplementasikan pembangunan yang baik untuk mensejahterahkan masyarakat. Seperti pendapat yang telah dikemukakan Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Pasolong (2011:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Orang sering beranggapan implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Nawawi dalam Pasolong (2011:92) kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman.

Maka kita tidak saja menghinggapi pemerintahan pada level pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tetapi juga dialami oleh pemerintahan pada level yang terkecil yakni Desa. Maka dalam organisasi pemerintah Desa juga sering terjadi masalah, dari hasil penelitian yang penulis lakukan

terkait dengan implementasi pembangunan infrastruktur Desa di Desa Tolonuo Selatan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa yang terdapat dalam APBDES tahun 2017 ada dua program infrastruktur yang di realisasikan pada tahun 2017, hal ini dapat di lihat kondisi yang terjadi di lapangan dimana peneliti melihat bahwa, kurangnya informasi yang di dapat masyarakat dalam proses implementasi program yang ada di Desa. Sehingga pada tahun 2017 program infrastruktur yang di realisasikan atau dilaksanakan yaitu Program Pembangunan Gedung posyandu dan WC Posyandu. Yang buat proyek posyandu dan wc posyandu, yaitu pemerintah Desa atau Sekretaris Desa Tolonuo Selatan Bpk A. N dan ada beberapa masyarakat, dengan anggaran untuk posyandu dan wc posyandu sebesar Rp 189,781,554. Namun pada realitanya masyarakat tidak mengetahui juga dalam hal dana karena tidak ada transparansi dalam penyaluran dana program pembangunan, dan untuk luas lahan yang seharusnya untuk pembangunan posyandu dan wc itu dengan luas lahan 30m x 30m tetapi yang terjadi di lapangan tidak sampai dengan luas lahan 30m x 30m hanya 6m x 20m sehingga untuk bangunan posyandu dan wc posyandu kelihatan terlalu kecil lokasinya. Maka dari itu dalam pelaksanaan program pembangunan proyek posyandu dan wc posyandu, yang seharusnya dipasang papan informasi anggaran di masing-masing proyek

tetapi terjadi di lapangan tidak di pasang papan informasi anggaran di masing-masing proyek, sehingga masyarakat juga harus mengetahui anggaran untuk masing-masing proyek.

Gordon dalam (pasolong 2011:58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Maka implementasi program pembangunan infrastruktur Desa sangat penting didalam lingkungan masyarakat agar masyarakat bisa merasakan perkembangan pembangunan atau perubahan di dalam Desa tersebut, dan yang diharapkan masyarakat implementasi program pembangunan infrastruktur Desa yang dilakukan Pemerintah Desa yang benar-benar jujur dan dengan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sehingga menciptakan keterbukaan dari pemerintah desa untuk pelaksanaan program pembangunan dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah serta mengambil perhatian untuk penulis meneliti, rumusan masalah yang dapat disusun adalah: Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Desa Tolonuo Selatan pembangunan infrastruktur di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, serta faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa Tolonuo Selatan.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi publik Chandler dan Plano dalam (Pasolong 2011:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategi terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye (Pasolong 2011:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Dan ada juga jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang/Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden (5) Peraturan Daerah. Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat Negara.

Namun demikian menurut Nugroho dalam (Pasolong 2011:40), kebijakan publik dibagi menjadi kelompok, yaitu: (1) kebijakan publik yang bersifat *makro*, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut diatas, (2) kebijakan yang bersifat *meso*, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. (3) kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Hinggis dalam Pasolong (2011:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dari definisi diatas bahwa implementasi kebijakan sebagai hasil rapat namun kemudian dilaksanakan kedalam berbagai kegiatan yang kemudian didalam pelaksanaan adanya sumber daya manusia atau orang-orang untuk mencapai tujuan dari kegiatan/sasaran tertentu.

Grindle dalam Pasolong (2011:57) Implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Dari definisi diatas bahwa implementasi merupakan

sebuah cara yang kemudian dilakukan untuk kepentingan dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Nawawi 2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari definisi diatas implementasi merupakan suatu proses kegiatan/tindakan baik yang dilakukan oleh, pribadi orang, pimpinan atau kelompok pemerintah dan swasta yang membawahkan dan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan atau ditetapkan kebijakan. Jones dalam Nawawi (2009: 132) mengemukakan implementasi kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Dari definisi diatas bahwa implementasi merupakan kemampuan dalam membentuk sebuah hubungan dalam proses hal untuk memutuskan dan menghubungkan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Nawawi (2009:131). Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan

Badan penelitian. Dari definisi diatas implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan pokok atau mendasar, dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan pimpinan/pejabat. Pressman dan Wildavsky dalam (Tachjan 2006: 24) mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Teori yang di pakai dalam penelitian ini adalah mengacu pada pendapat Edward III dalam (Haedar Akib 2010:5-6) mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya

dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.

Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan' Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

1. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;

3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan

4. Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Afiffuddin (2010:41-42) Banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar, dan sebagainya. Padahal, artinya pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda bahwa sebagian manusianya makmur. Walaupun demikian, adilkah jika terdapat jalan layang, gedung-gedung bertingkat, tetapi sebagian masyarakat menderita ? Banyak yang berpendapat bahwa jika ada uang, pembangunan lancar, padahal tidak selalu demikian.

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan adalah perubahan, perubahan dalam arti mewujudkan suatu

kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Menurut Mustikawati (2016: 2742) Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (*organisasi*) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*). Suryono dalam Mustikawati (2016:2742) pembangunan adalah upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi, selaras dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pengertian Infrastruktur Desa

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia dalam Mustikawati (2016:2743), Infrastruktur adalah prasarana. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa infrastruktur adalah segala bentuk prasarana yang merujuk pada bentuk fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung kegiatan manusia. Kemudian menurut Grigg dalam Kodoatie (Mustikawati 2016: 2743) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Menurut Grigg dalam Kodoatie (Mustikawati 2016: 2743) Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari pengertian pembangunan dan infrastruktur diatas maka menurut penulis bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prasarana yang secara

fisik dilakukan untuk merubah kondisi yang ada di lingkungan masyarakat kearah yang lebih baik dan mengarah ke pengembangan pertumbuhan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah; metode analisis deskriptif, Penggunaan metode ini untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara kualitatif, dengan pada kondisi objek dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif bagaimana dalam implementasi kebijakan pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa pada Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Seluruh data diperoleh langsung dari informan lapangan dengan menggunakan wawancara, observasi dan, dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian kualitatif.

Instrumen peneliti adalah peneliti sendiri dan sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan penelitian ini adalah membuat deskripsi mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan menjelaskan fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik informan penelitian yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling* menentukan dimana peneliti cukup memahami dan ketahui informasi awal tentang objek atau sasaran yang akan diteliti maupun informasi penelitian. Dengan demikianlah seluruh informasi penelitian yang

akan dibutuhkan dalam proses pengumpulan data yaitu di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, dan yang menjadi informan atau yang diwawancarai yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, masyarakat.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data digunakan dengan cara wawancara dan observasi karena pada dasarnya seorang peneliti akan melakukan pengukuran terhadap fenomena atau kejadian sosial maka dalam meneliti harus ada alat ukur yang tepat agar bisa mendapatkan dan memperoleh hasil penelitian yang baik. Menurut Pasolong (2012:130.137). Untuk mendapatkan data dibutuhkan didalam penelitian ini digunakan beberapa cara yaitu :

a. Wawancara

wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai interviewee. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (telephone). Dan yang akan diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan masyarakat.

b. Observasi

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, salah satu teknik yang digunakan adalah observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan teknik (cara) yang pertama kali digunakan dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti observasi terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan Gedung Posyandu, WC Posyandu di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non instansi berupa dokumen atau aspirasi-aspirasi yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumen yang relevan dengan penelitian ini berbentuk kebijakan. Nugroho (2006: 31). Produk kebijakan terdiri atas tiga kelompok, yaitu:

- Kebijakan makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti undang-undang dasar 1945 dan undang-undang.
- Kebijakan bersifat meso yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan menteri, peraturan gubernur, bupati atau walikota.
- Kebijakan bersifat mikro yaitu kebijakan bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti yang dikeluarkan aparat dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012:339-341) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Redukdi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tolonuo Selatan

Implementasi kebijakan adalah merupakan sebuah pengarah yang sah dari suatu kebijakan. Implementasi dipandang sebagai suatu hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang tidak dijumpai atau di dapat dalam konsep muncul di lapangan. Selain itu ancaman atau tantangan utama adalah konsisten implementasi program itu sendiri, bahwa tanpa implementasi yang efektif maka pembuat keputusan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Tolonuo Selatan, yaitu pembangunan dalam bentuk fisik antara lain gedung posyandu, wc posyadu. Sesuai dari hasil di lapangan yang peneliti dapatkan bahwa menunjukan program pembangunan Desa Tolonuo Selatan yang di tunjang oleh program pemerintah pusat dan daerah, tetapi kebijakan ini yang seharusnya sangat berpengaruh pada perubahan pembangunan. Yang lebih kususny pada pembangunan dalam bentuk fisik, yaitu gedung posyandu, wc posyandu tepat pada sasaran atau keinginan masyarakat. Tetapi pada realita yang terjadi sangat berbeda tujuan program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat dan kesempatan kerja masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.

Proses Implementasi Pembangunan Infrastruktur.

Program pembangunan infrastruktur merupakan tahapan pelaksanaan program yang melibatkan organisasi pemerintah dan kelompok sasaran tertentu, yang di anggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk di salurkan ke setiap Desa.

Keterangan dari informan Kades Tolonuo Selatan Informan D.K Menerangkan.

Kalau untuk pelaksanaan suda cukup baik, walaupun masi ada kekurangan lampu jalan dan kalu posyandu suda hampir selesai. Kalau dalam perencanaan program ini saya kurang tau dilibatkan masyarakat atau tidak karna saya hanya melanjutkan program ini karna program di rencanakan tahun 2017. Untuk target kerja dari masing-masing program itu posyandu, wc posyandu tiga bulan/empat bulan. Kalau yang kerja program posyandu itu Sekretaris Desa Tolonuo Selatan (tukang) dan 6 orang tenaga kerja,. Anggaran posyandu, wc posyandu itu sebesar 189 juta sekian. Bekerja sama dan bersifat baik dan terbuka dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau untuk mekansimenya sudah bagus karna pekerjaan atau kerja sudah hampir selesai dan masyarakat sebagian suda bisa menikmati manfaatnya. (13 April 2018. Pukul: 10:13 WIT)

Berbeda dengan yang di katakan oleh informan N P Adalah;

Blom ada sosialisasi dari pemerintah Desa. Kalu program ini torang tra setuju. Untuk target kerja torang tra tau berapa lama. Kalu posyandu itu

6 orang deng kalu lampu jalan itu 6 orang. Sebenarnya kalu pemerintah desa tra bisa kerja, musti masyarakat biasa yang kerja kalu pemerintah desa dorang hanya awasi orang yang kerja saja. Anggaran torang tra tau anggaran lampu jalan deng posyandu, kalu lahan dorang beli 18 juta. Kalu kejujuran dorang kurang terbuka di masyarakat deng dorang hanya janji tinggal janji saja. Kalu dorang pe cara kerja kurang bagus karna blom selesai anggaran so abis. Proses pelaksanaan kurang bagus karna pembangunan deng posyandu, wc posyandu blom selesai bikin. (24 April 2018. Pukul 10:20 WIT)

Dari hasil wawancara dengan informan MB penulis mendeskripsikan kembali, bahwa dalam pelaksanaa program pembangunan infrastruktur sebagai pelaksana pemerintah (kepala Desa) dan seluruh perangkatnya, sudah berusaha untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang walaupun sebagian program belum di nikmati masyarakat namun pelaksanaannya sudah cukup baik, karna itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah desa yang harus di jalankan.

Dari hasil wawancara dengan informan N P penulis mendeskripsikan kembali bahwa dalam pelaksanaan program belum ada sosialisasi dari pemerintah desa dan juga mengenai anggaran pun masyarakat tidak mengetahui sehingga meknisme kerjanya kurang baik dan proses pelaksanaannya kurang baik karena anggarannya sudah habis, sehingga pelaksanaan untuk program yang ada tidak terlaksana sesuai dengan target kerja yang sudah di tetapkan oleh pemerintah desa dan ada juga yang masyarakat kurang setuju dengan tenaga kerja pemerintah desa itu sendiri yang dipakai untuk kerja program pembangunan yang masyarakat harapkan pemerintah desa itu hanya mengawasi

pekerjaan bukan ikut dalam melakukan pekerjaan.

Dari hasil wawancara M B serta hasil observasi, penulis menganalisa bahwa anggaran yang di pergunakan untuk posyandu, wc posyandu tidak dipergunakan sepenuhnya karena ada program di tahun 2016 tidak diselesaikan oleh mantan kades sehingga sebagian anggaran 2017 dipergunakan untuk menyelesaikan program yang di tahun 2016. sehingga program yang ada di tahun 2017 tidak ditelaksana atau tidak selesai.

Program Desa yang dirancang oleh pemerintah Desa dalam hal infrastruktur desa atau program dalam bentuk fisik berupa gedung posyandu, wc posyandu hal ini menunjukan di lapangan tidak sesuai tujuan utama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dan membawa dampak positif pada masyarakat yaitu program tersebut bertujuan untuk membangun desa, bukan hanya formalitas saja. Karena hasil observasi yang menunjukan pelaksanaan anggaran tidak sepuh untuk program posyandu,wc posyandu.

Menurut Sabatier dalam (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012: 19-20) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para

petugas di lapangan dan kelompok sasaran

- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
- e. Dukungan para stakeholder
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Todaro dalam (Herman et.al 2014: 2284) bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnya pun kurang optimal.

Dari hasil uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi pembangunan infrastuktur kurangnya adanya konsisten terhadap program yang sudah direncanakan atau dilaksanakan sehingga realita yang terjadi di lapangan lemahnya anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan posyandu,wc posyandu, karena di perhambat dengan tidak dipergunakan anggaran sepenuhnya pada program posyandu,wc posyandu dan lampu jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sekdes Jati KP Instrumen

Pelaksanaannya suda cukup baik karna masyarakat yang lain suda bisa menikmati dan posyandu suda hampir selesai. Dalam perencanaan program dilibatkan masyarakat dan suda di sosialisasikan kepada masyarakat. Targer kerja itu posyandu tiga (3) bulan. panitia pelaksana yaitu kepala desa,

bendahara dan sekretaris dan Posyandu yang kerja/buat saya dan enam orang masyarakat itu Roly Pihang (tukang las) dan galian tanah lubang kabel 6 orang masyarakat. Sumber anggaranya dari dana desa, Anggaran posyandu,wc posyandu Rp.189,781,554 dan. Adanya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai anggaran. Kalau untuk cara kerja suda baik karna program yang ada suda sebagian masyarakat nikmati manfaatnya seperti Wc Gedung posyandu sudah dipergunakan.(13 April 2018. Pukul: 06:10 WIT)

Dari hasil wawancara dengan informan K P penulis mendeskripsikan kembali, panitia Pelaksana di bentuk oleh pemerintah Desa, salah satunya kepala Desa, sebagai kepala pelaksana kebijakan desa, kemudian membentuk badan pengurus dalam pelaksanaan program desa, antara lain membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan program pembangunan yang ada RT setempat yang lokasinya sebagai penerima program. Misalnya posyandu, wc posyandu proses pelaksanaan program tergantung anggaran yang didapat Tahun 2017, anggaran Rp.189 juta. Pelaksanaan program pembangunan posyandu,wc posyandu di dapat dari pencairan anggaran tahap II.

Berdasarkan keterangan dari informan K P maka penulis melihat situasi di lapangan bahwa yang menjadi hambatan pekerjaan adalah anggaran dan tidak konsisten para pekerja, sehingga dalam melakukan program tidak terlaksana secara baik, hal ini menunjukkan hasil pekerjaan tidak berjalan sesuai mekanisme program atau hasil kurang memuaskan dimata masyarakat dan para pekerja yang lain. Sehingga masalah yang penulis amati sangat berpengaruh pada hasil

dan tujuan dari program itu sendiri sehingga banyak masyarakat yang kurang setuju dengan pelaksanaan program tersebut. Kemudian jangan kita hanya melihat keberhasilan secara tertulis seperti pada dokumen anggaran di bawah ini.

Tabel 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Anggaran

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
Pembangunan Gedung Posyandu Dan WC Posyandu	Rp. 189,781,554

Sumber: Dokumen APBDES, 2017

Dari hasil uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kurangnya anggaran dan tidak konsisten para pelaksana, sehingga proses pelaksanaan program tidak terlaksana dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang menanggapi program pembangunan belum selesai anggarannya sudah habis hal ini yang menunjukan bahwa proses pelaksanaan program tidak sesuai dengan perencanaan anggaran dan program sehingga yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan harus ada pengawasan dari pemerintah Desa terlebih kusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil wawancara dengan informan ketua BPD. (D I. B)

Pada dasarnya BPD melaksanakan tugas-tugas pengawasan itu mengacu pada permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa dalam pasal 32 kususnya huruf (c) tugas BPD melaksanakan pengawsan.

Pengawasan yang kami lakukan itu melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, bentuk pengawasan kami berupa monitoring dan evaluasi. (28 April 2018.pukul 03:20 WIT)

Hasil wawancara dengan informan wakil ketua BPD. (E M).

Untuk pengawasan di Desa ini cukup serius dan dalam pengawasan program itu tetap sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Saling terbuka dan koordinasi antara BPD dan pemerintah Desa, Bekerja sama dalam melaksanakan program pembangunan. (13 April 2018. pukul 11:10 WIT)

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa BPD juga mengawasi perencanaan kegiatan pemerintah desa kemudian pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa, dan bentuk pengawasannya berupa monitoring dan evaluasi, sehingga untuk pengawasan di desa BPD cukup serius dalam pengawasan program pembangunan sesuai dengan masyarakat inginkan atau harapkan yaitu seperti saling terbuka dan koordinasi serta bekerja sama dalam melaksanakan program.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Faktor dalam implementasi kebijakan adalah suatu penyebab pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam model implementasi kebijakan Edward III ada 4 faktor yaitu 1.

Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi.

Menurut informan M R bahwa:

Dorag blom perna kase sosialisasi pa torang. Setuju karna so jadi, jadi torang setuju saja. Kalu untuk posyandu itu torang lia somo selesai dari bulan januari sampe bulan maret dorang bikin jadi sekitar so tiga bulan ini,. sedangkan pekerja Torang tra tau berapa orang yang kerja.

Sumber daya manusia (tenaga kerja) Setuju saja karna ada masyarakat yang kerja walaupun yang kapala tukang Pemerintah Desa me tra apa. Kalu biaya torang tra tau anggaran posyandu,wc posyandu Kalu kejujuran torang bilang tra jujur kalu jujur berarti kalu anggaran samua yang datang pasti dorang kumpul masyarakat samua. Kalu cara kerja torang setuju saja karna torang lia so jadi itu posyandu,wc posyandu. Kalu dorang pe proses kerja itu so bagus karna somo selesai deng posyandu,wc posyandu. (14 April 2018. Pukul 02:00 WIT)

Komunikasi yaitu menunjukan bahwa kebijakan atau program yang dapat dilaksanakan dengan jika adanya penyampaian informasi yang secara baik antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Maka program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari terjadi pemutarbalikan fakta atas suatu kebijakan dan program.

Komunikasi

Menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan program yang ada di

desa. Komunikasi juga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa:

Hasil wawancara dengan ibu N P (masyarakat) *Blom ada sosialisasi dari pemerintah Desa. Kalu program ini torang tra setuju. Untuk target kerja torang tra tau berapa lama. Kalu posyandu itu 6 orang*

Hasil wawancara dengan ibu M R (Masyarakat) *Dorang blom perna kase sosialisasi pa torang. Setuju saja karna so jadi, jadi torang setuju saja.kalu untuk posyandu itu torang lia somo selesai dari bulan januari sampe bulan maret dorang bikin jadi sekitar so tiga bulan ini. sebagian, torang tra tau berapa orang yang kerja.*

Hasil wawancara dengan Bpk Sekretaris Desa K P. *Pelaksanaannya suda cukup baik karna lampu jalan masyarakat yang lain suda bisa menikmati dan posyandu suda hampir selesai. Dalam perencanaan program dilibatkan masyarakat dan suda di sosialisasikan kepada masyarakat.target kerja itu posyandu tiga (3) bulan.*

Hasil wawancara dengan informan Wakil Ketua BPD (E M) *Untuk pengawasan di Desa ini cukup serius dan dalam pengawasan program itu tetap sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Saling terbuka dan koordinasi antara BPD dan pemerintah Desa dalam pelaksanaan program, Bekerja sama dalam melaksanakan program*

pembangunan. (13 April 2018.pukul 11:10 WIT)

Pemerintah Desa harus menyampaikan informasi sesuai dengan jelas dan peraturan yang sah kepada masyarakat yang belum memahami dengan adanya program didalam desa. dan juga dibutuhkan pendekatan oleh pemerintah desa kemasyarakat penerima program atau desa, agar dipahami oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu sosialisasi itu sangat penting dan harus dilakukan dan juga komunikasi antara organisasi pemerintah desa dalam hal ini pembuat kebijakan dengan peleksana kebijakan, harus adanya komunikasi yang baik agar program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang dilaksana Pemerintah Desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan tidak setuju dengan program yang dibuat oleh Pemerintah Desa karena tidak sepengetahuan masyarakat program sudah dilaksanakan, hal ini yang menjadi banyak masyarakat yang mengeluh dengan cara kerja Pemerintah Desa.

Dari hasil wawancara, observasi penulis menganalisa bahwa hasil wawancara dengan masyarakat, sekretaris Desa dan wakil Ketua BPD yang penulis terima dari informan terkait dengan komunikasi: bahwa pemerintah Desa tidak memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga dari hasil wawancara diatas ada masyarakat yang mengatakan bahwa belum ada sosialisasi dari pemerintah desa, ada juga masyarakat yang sampaikan bahwa tidak setuju dengan program yang dibuat oleh pemerintah desa dan ada juga untuk target kerja masyarakat tidak ketahui. Kemudian hasil wawancara dari sekretaris desa bahwa dalam perencanaan program dilibatkan masyarakat dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan juga hasil wawancara dengan

wakil ketua BPD bahwa dalam BPD sangat serius dalam pengawasan sesuai masyarakat inginkan yaitu saling terbuka dan koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program, bekerja sama dalam melaksanakan program pembangunan. Tetapi menurut penulis yang disampaikan oleh Sekretaris Desa bahwa dalam perencanaan program dilibatkan masyarakat dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi realitanya tidak ada waktunya kapan disosialisasi, tempatnya di mana sosialisasi itu dilakukan dan daftar hadir atau berita acaranya tidak ada sehingga hal ini masyarakat tidak merespon program pembangunan yang di buat oleh pemerintah Desa. Kemudian yang di sampaikan oleh wakil ketua BPD bahwa yang katanya saling terbuka dan saling koordinasi, bekerja sama dalam melaksanakan program pembangunan antara BPD dan Pemerintah Desa. Tetapi realita yang terjadi program yang dilaksanakan tidak selesai sesuai dengan target kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah Desa. komunikasi merupakan penyampaian informasi kepada orang lain, maka dari itu pemerintah desa harus memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui terkait dengan program pembangunan di desa sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan merespon dengan baik terkait dengan program yang di buat oleh pemerintah desa atau pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III dalam (Haedar Akib 2010:5-6) mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja

birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Dari penjelasan diatas bahwa komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana melalui proses penyampaian informasi, kejelasan informasi yang disampaikan dan konsisten informasi yang disampaikan. Tetapi realita yang terjadi di lapangan bahwa proses penyampaian informasi tidak ada terhadap masyarakat, tidak ada kejelasan informasi maupun sosialisasi dan tidak konsisten informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat.

Keterangan informan Y M Belum ada sosialisasi di masyarakat. Kalau tanggapan saya baik terhadap program ini karna pemerintah desa suda bisa membangun program posyandu,wc posyandu. Kurang begitu tau terkait dengan target kerja. Kurang tau berapa orang tenaga kerja, kalau kapala tukang bangunan posyandu itu Bpk. K P (Sekretaris Desa) Sumber daya manusia (tenaga kerja).

Menurut saya kalau pemerintah desa itu hanya mengontrol saja pekerjaan yang ada dan di kasi ke masyarakat untuk yang kerja bangunan. Sumber daya finansial (pembiayaan)

Kalu untuk anggaran saya kurang tau. Yang sebenarnya harus saling keterbukaan saja mengenai anggaran cuma kurang terbuka mengenai anggaran. Kalau cara kerja suda cukup baik pemerintah desa punya cara kerja tapi harus terbuka mengenai anggaran. Kalau proses Kalau proses pelaksanaan suda cukup baik karena sebagian

*proyek suda bisa di nikmati masyarakat walaupun belum seratus persen selesai.
(17 April 2018. Pukul 12:30 WIT).*

Rp.189,781,554 dan untuk lampu jalan Rp.190,674,530.

Berdasarkan data dokumen dari APBDES Tahun 2017 anggaran posyandu, wc posyandu dan anggaran lampu jalan. Dapat dilihat pada tabel di bawah:

Sumber daya, merupakan penunjang setiap kebijakan sehingga harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik secara sumberdaya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang melaksanakan program untuk mencapai tujuan dan manfaat untuk kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah merupakan pembiayaan atas sebuah program/kebijakan pemerintah.

PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
Pembangunan Gedung Posyandu Dan WC Posyandu	Rp. 189,781,554

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang menunjang kegiatan/program yang akan dilaksanakan yaitu sumberdaya manusia serta sumberdaya finansial. Hal tersebut mendukung keberhasilan program antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan/program. Misalnya dilihat dari kemampuan sumberdaya manusia sangat mendukung untuk pelaksanaan program, tetapi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini yaitu sumberdaya finansial atau pembiayaan sehingga proses pelaksanaannya tidak berjalan dengan secara baik. berdasarkan hasil wawancara dengan informan,

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa K P panitia pelaksana yaitu kepala desa, bendahara dan sekretaris dan Posyandu yang kerja/buat Kornodus Panawar (sekdes) dan enam orang masyarakat Sumber anggaranya dari dana desa, Anggaran posyandu,wc posyandu

Sumber: Dokumen APBDES Tahun 2017

Penulis observasi atau pengamatan bahwa realita yang terjadi di lapangan gedung posyandu, wc posyandu belum selesai anggarannya suda habis, sehingga yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yaitu sumberdaya finansial atau pembiayaan. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen penulis menganalisa bahwa sesuai hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait dengan sumberdaya finansial sama jumlah anggaran dengan yang terdapat dalam APBDES Tahun 2017, tetapi sesuai observasi yang penulis lakukan bahwa realita yang terjadi di lapangan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program yaitu anggarannya sudah habis sehingga proses pelaksanaannya tidak terlaksana sampai selesai sehingga nantinya dilanjutkan dengan anggaran yang baru atau anggaran 2018. dan juga dalam pelaksanaan program masyarakat tidak mengetahui anggaran dari masing-masing proyek, hal ini yang menjadi masyarakat banyak mengatakan bahwa terkait dengan anggaran yang tidak secara terbuka terhadap masyarakat dan

masyarakat tidak setuju dengan program yang dibuat oleh pemerintah desa karena tidak ada sosialisasi lalu dilaksanakan program tersebut.

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Dari penjelasan diatas bahwa sumberdaya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan. Tetapi realita yang terjadi di lapangan terkait dengan sumberdaya tenaga kerja/staf kurang adanya kerja sama dan jumlah kurang sehingga proses pelaksanaannya tidak berjalan lancar. Kemudian mengenai sumberdaya dana atau anggaran yang tidak dipergunakan sepenuhnya untuk proyek atau program sehingga fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tidak terlalu lengkap misalnya material, anggaran dan lain-lain.

Disposisi merupakan karakteristik yang harus ada pada setiap pelaksana kebijakan/program (implementor). Karakter yang harus dimiliki pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen dan konsisten dan demokrasi. Pelaksana kebijakan yang memiliki karakter atau sifat tersebut mampu menjalankan program dengan tidak adanya kendala.

Disposisi

Untuk melakukan kegiatan atau program dibutuhkan karakter atau sifat baik yang harus dimiliki oleh para pelaksana

kebijakan (implementor) yaitu keterbukaan dalam penyaluran dana atau kesiapan material yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan juga harus adanya komitmen dalam tugas serta penuh dengan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan,

Hasil wawancara dengan Bapak F S
Instrumen :

Kalu mo bilang jujur musti kase tau anggaran yang dorang ada bikin bangunan ini tapi skarang dorang tra kase tau ini.

Hasil wawancara dengan Ibu M R
Instrumen:

Kalu kejujuran torang bilang tra jujur kalu jujur berarti kalu anggaran samua yang datang pasti dorang kumpul masyarakat samua.

Hasil wawancara dengan Bapak Y M
Instrumen:

Yang sebenarnya harus saling keterbukaan saja mengenai anggaran cuma kurang terbuka mengenai anggaran.

Disposisi yang harus diutamakan karena menunjukan program/kebijakan terlaksana dengan baik harus adanya karakter yang baik, Sehingga penilaian masyarakat terhadap pelaksana kebijakan adanya kesan yang baik. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa karakter atau sifat pelaksana kebijakan tidak terbuka atau jujur terhadap program pembangunan yang ada, sehingga walaupun anggaran sudah habis tidak secara terbuka kepada masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat hanya bertanya-tanya kenapa proyek pembangunan tidak diselesaikan padahal sudah 3 bulan proses pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi penulis menganalisa bahwa disposisi merupakan karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh pelaksana tetapi tanggapan masyarakat berbeda sesuai dengan hasil wawancara atau keterangan dari masyarakat yang di sampaikan terkait dengan kejujuran dari pelaksana/pemerintah desa sangat tidak transparansi dan jujur sehingga banyak masyarakat menilai pemerintah desa tidak transparan/jujur dengan anggaran. Maka dari itu masyarakat inginkan keterbukaan dan kejujuran dari pelaksana atau pemerintah desa karena setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya keterbukaan dan kejujuran dari para pelaksana maka akan sia-sia dan akan jauh dari apa yang di harapkan oleh masyarakat dan tidak akan berhasil.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Dari penjelasan diatas bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Tetapi realitanya yang terjadi di lapangan bahwa komitmen/kejujuran pelaksana tidak terlalu nampak di lingkungan masyarakat, yang seharusnya harapan masyarakat yaitu transparansi/keterbukaan dari pemerintah desa itu sangat penting.

Struktur Birokrasi menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu yang pertama mekanisme dan yang kedua organisasi pelaksana kebijakan itu sendiri.

Struktur Birokrasi

Mekanisme pelaksanaan program biasanya suda ditetapkan melalui standar operasional prosedur yang di cantumkan kebijakan/program atau mencantumkan

kerangka kerja yang jelas, dalam pelaksanaan program di Desa Jati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan;

Hasil wawancara dengan F S; *Kalu dorang pe cara kerja so mulai bagus kerja dorang somo kase selesai pembagunan posyandu. Kalu dia pe proses kerja so bagus suda karna somo selesai samu.*

Hasil wawancara dengan ibu N P; *Kalu dorang pe cara kerja kurang bagus karna blom selesai anggaran so abis. Proses pelaksanaan kurang bagus karna Pembangunan posyandu, wc posyandu blom selesai bikin.*

Hasil wawancara dengan Bapak Y M; *kalau cara kerja suda cukup baik pemerintah desa punya cara kerja tapi harus terbuka mengenai anggaran. Kalau proses pelaksanaan suda cukup baik karena sebagian proyek suda bisa di nikmati masyarakat walaupun belum seratus persen selesai.*

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa struktur birokrasi atau mekanisme dalam pelaksanaan kerja tidak berjalan baik karena anggaran untuk proyek sudah habis sehingga proses pelaksanaannya tidak sampai selesai atau tidak sampai seratus persen. Kerangka kebijakan dalam pembangunan infrastruktur kerangka kerja kurang jelas atau orang-orang yang terlibat hanya pemerintah desa (sekretaris desa) sedangkan yang masyarakat inginkan pemerintah desa hanya mengawasi pelaksanaan program dan diberikan pekerjaan kepada masyarakat untuk kerja karena banyak masyarakat yang punya keahlian dibidang pertukangan. Dari penjelasan di atas, membuktikan betapa pentingnya struktur

birokrasi dalam mekanisme pelaksanaan program pembangunan gedung posyandu, wc posyandu yang dilaksanakan di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, tentunya muntuk menunjang bagaimana program tersebut dapat berjalan dengan lancar, dimana mestinya dalam pelaksanaan program perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: pertama, proyek untuk program gedung posyandu, wc posyandu yang dilaksanakan di Desa Tolonuo Selatan harus diberikan kepada masyarakat yang punya keahlian di pertukangan (tukang batu).

Program pembangunan infrastruktur sesuai dari data dokumen APBDDES Tahun 2017 untuk gedung posyandu, wc posyandu Rp. 189,781, 554 dengan demikian, semua pembiayaan dapat dibayar, sehingga terlaksana dengan baik dan masyarakat Desa Tolonuo Selatan bisa menerima program pembangunan infrastruktur sesuai dengan masyarakat inginkan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menganalisa bahwa struktur birokrasi yang mekanisme atau kerangka kerja dalam suatu program sangat menentukan untuk bagaimana program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan berhasil, karena tanpa kerangka kerja yang baik maka pekerjaan yang dilaksanakan pun akan terganggu proses penyelesaiannya. Mekanisme kerja yang sungguh mengecewakan masyarakat yang tergambar dari penjelasan masyarakat di atas, dimana masyarakat mengeluh dengan hasil kerja yang ada, karena pekerjaan tidak selesai seratus persen anggarannya sudah habis, hal ini pemerintah desa tidak memiliki perencanaan yang baik dan mekanisme kerja yang baik terhadap program pembangunan infrastruktur yaitu gedung posyandu, wc posyandu yang dilaksanakan di Desa Tolonuo

Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur

Sumber:

Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan' Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Dari penjelasan diatas bahwa struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata kerja aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Tetapi yang terjadi di lapangan bahwa mekanisme proses pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan sesuai target kerja, tidak diselesaikan anggarannya sudah habis, dan masi banyak kekurangan material dan anggaran.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan Program pembangunan infrastruktur merupakan tahapan pelaksanaan program yang melibatkan organisasi pemerintah desa dan kelompok sasaran tertentu, yang di anggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk di salurkan ke setiap Desa. Pelaksanaa program pembangunan infrastruktur sebagai pelaksana

pemerintah (kepala Desa Tolonuo Selatan) dan seluruh perangkatnya, sudah berusaha untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang walaupun sebagian program belum di nikmati masyarakat namun pelaksanaannya sudah cukup baik, karna itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah desa yang harus di jalankan. Namun realitanya pelaksanaan program belum ada sosialisasi dari pemerintah desa dan juga mengenai anggaran pun masyarakat tidak mengetahui sehingga meknisme kerjanya tidak baik dan proses pelaksanaannya tidak baik karena anggarannya sudah habis, sehingga pelaksanaan untuk program yang ada tidak terlaksana sesuai dengan target kerja yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Desa.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

a. komunikasi

kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui program pembangunan di desa, Menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan program yang ada di desa.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang menunjang kegiatan/program yang akan dilaksanakan yaitu sumberdaya manusia serta sumberdaya finansial. Hal tersebut mendukung keberhasilan program antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan/program. yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini yaitu sumberdaya finansial atau pembiayaan sehingga proses

pelaksanaannya tidak berjalan dengan secara baik. Sehingga gedung posyandu,wc posyandu dan lampu jalan belum selesai anggarannya suda habis, sehingga yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yaitu sumberdaya finansial atau pembiayaan.

c. Disposisi

Untuk melakukan kegiatan atau program dibutuhkan karakter atau sifat baik yang harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan (implementor) yaitu keterbukaan dalam penyaluran dana atau kesiapan material yang butuhkan untuk melaksanakan program dan juga harus adanya komitmen dalam tugas serta penuh dengan rasa tanggung jawab, hal ini yang harus diutamakan karena menunjukan program/kebijakan terlaksana dengan baik harus adanya karakter yang baik, Sehingga penilaian masyarakat terhadap pelaksana kebijakan adanya kesan yang baik.

d. Struktur Birokrasi

Mekanisme pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur kerangka kerja kurang jelas atau orang-orang yang terlibat hanya pemerintah desa (sekretaris desa) sedangkan yang masyarakat inginkan pemerintah desa hanya mengawasi pelaksanaan program dan diberikan pekerjaan kepada masyarakat untuk kerja karena banyak masyarakat yang punya keahlian dibidang pertukangan.

Saran/Rekomendasi

Proses Pelaksanaan Program

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat sebelumnya maka penulis dapat merekomendasikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dalam hal untuk berperan aktif sebagai orang yang memantau dan pengawasan dalam proses pelaksanaan program serta dukungan dari semua perangkat Desa dan

selalu memberikan informasi kepada masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur

- c. Dari faktor komunikasi; Dalam melaksanakan program pemerintah lebih dahulu memberikan sosialisasi program, agar kelompok sasaran atau penerima program dapat mengetahui perencanaan program dan pelaksanaan program itu.
- d. Dari variabel sumberdaya; Dalam pembuatan gedung posyandu, wc posyandu harus dilibatkan oleh tukang batu atau orang yang mempunyai dalam keahlian dalam pembangunan sehingga diberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat, jangan lagi pemerintah desa yang buat/kerja program pembangunan di dalam Desa. Serta harus adanya keterlibatan para pelaksana program yang mempunyai tugas dalam mengarahkan jalanya program tersebut.

Dari segi sumberdaya finansial.

Sumberdaya finansial sangatlah menentukan proses pelaksanaan program maka dari itu, harus ketersediaan finansial/biaya program harus sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan dan seharusnya dipergunakan sepenuhnya untuk program yang sememta berjalan

bukan untuk dipergunakan untuk program yang lain.

- a. Dari faktor disposisi
Dalam melakukan setiap kegiatan/program pemerintah desa harus mempunyai komitmen, kejujuran dan konsisten dalam pelaksanaan program untuk menuju suksesnya program pembangunan infrastruktur di desa.
- b. Dari faktor struktur birokrasi
Pentingnya struktur birokrasi dalam mekanisme pelaksanaan program pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, tentunya menunjang untuk program tersebut dapat berjalan dengan lancar, yang seharusnya dalam pelaksanaan program perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama: proyek untuk program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara yang seharusnya dilibatkan sepenuhnya kepada masyarakat yang membuat/kerja.
Kedua: program pembangunan infrastruktur yaitu gedung posyandu, wc posyandu dan lampu jalan harus lebih di awasi pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam proses pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
Ketiga: penyediaan anggaran harus sesuai dan pergungan sepenuhnya untuk program

yang sementara dilaksanakan bukan diperuntukan program yang lain.

Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 02; No. 01; 2010; 30-36

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Akib Haedar, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana," Jurnal Administrasi publik, Volume 1 No. r rhn. 2010
- Herman Jimmy, Nur Fitriyah, Rita Kalalinggi. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 4, 2014: 2281-2291.
- Moleong Lexi J. 2006, *Metode penelitian kualitatif, Remaja pasda karya Bandung*.
- Moleong. J. Lexi. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mustikawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara", eJournal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 2739 – 2752.
- Nawawi Ismail. 2009. *Publik Policy. Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, PMN. Surabaya
- Nanang Rohman, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan*
- Pasolong Harbani. 2012 , *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta. Bandung
- Puspita Sari Mitra, *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*, eJournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, 2015 : 549-563.
- Pasolong Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Puji Lestari Endah, Riyanto, Adiono Romula, *Implemetasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 3, No. 5, Hal. 800-806.
- Purwanto Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *implementasi kebijakan publik, konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Santer Nicko, *Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Semanggaris Dan Desa Luso)*, eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 3, 2015: 237-251.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama. Bandung

Tachjan. H. 2006. *Implementasi kebijakan publik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).* Bandung.

Yonatan, Fitriyah Nur, Margono Antonius, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau,* Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4, Desember 2014, Hal 538.

Produk Kebijakan:

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa